



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

PENERAPAN BBM RENDAH SULFUR UNTUK PENINGKATAN KUALITAS UDARA

T. Ade Surya

Analisis Legislatif Ahli Madya
teuku.surya@dpr.go.id

Nadhirah Nurul Saleha Saragih

Analisis Legislatif Ahli Pertama
nadhirah.saragih@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Sektor transportasi menjadi salah satu kontributor utama polusi udara di Indonesia. Penggunaan bahan bakar minyak (BBM) berkualitas rendah pada kendaraan bermotor menjadi penyebabnya. BBM berkualitas rendah yang saat ini dominan beredar di pasaran mengandung sulfur yang sangat tinggi yang berkontribusi signifikan pada terjadinya polusi udara, khususnya di wilayah perkotaan. Buruknya kualitas udara berdampak pada pencemaran lingkungan, penurunan produktivitas, peningkatan risiko terkena penyakit, dan peningkatan beban ekonomi akibat biaya kesehatan.

Dampak buruknya kualitas udara yang sering menjadi sorotan adalah terkait kondisi kesehatan masyarakat. Ketua Research Center for Climate Change Universitas Indonesia (RCCC UI), Budi Haryanto, mengungkapkan bahwa di Jakarta dalam kurun waktu tahun 2016-2021, tercatat sebanyak 175 ribu hingga 599 ribu kasus penyakit disebabkan oleh polusi udara, seperti infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), asma, dan infeksi paru-paru. Dalam konteks ekonomi, berdasarkan laporan Bank Dunia, polusi udara di Indonesia dapat mengurangi produk domestik bruto (PDB) sekitar USD220 miliar atau sekitar 6,6% per tahun. Jika pemerintah ingin mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% maka persoalan kualitas udara harus ditangani secara serius melalui pengelolaan emisi di sektor transportasi.

Upaya untuk mengatasi permasalahan polusi udara sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2017 (Permen LHK P.20/2017) tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori M, Kategori N, dan Kategori O. Namun, penyelerasan spesifikasi BBM dengan Permen LHK P.20/2017 yang mensyaratkan teknologi mesin kendaraan sesuai standar Euro 4 dengan kandungan sulfur maksimal 50 *parts per million* (ppm), belum berjalan optimal. BBM yang beredar di pasaran masih didominasi oleh BBM dengan kandungan sulfur tinggi, yaitu 150-400 ppm, jauh di atas standar yang ditetapkan. Saat ini, tercatat produk PT Pertamina (Persero)/Pertamina, seperti Pertadex, Pertamax Green, dan Pertamax Turbo yang baru memenuhi standar Euro 4. Sementara sisanya, termasuk BBM bersubsidi, yakni Biosolar dan Peralite, serta Dexlite dan Pertamax belum memenuhi standar tersebut. Hambatan dalam penerapan BBM rendah sulfur sesuai standar Euro 4 mencakup pandemi Covid-19, keterbatasan pasokan, serta ketiadaan payung hukum yang jelas untuk penugasan Pertamina sebagai penyedia.

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah merancang peta jalan untuk penerapan BBM rendah sulfur sesuai standar Euro 4 di seluruh Indonesia. Mulai tahun 2025, Jakarta akan menjadi provinsi pertama yang menerapkan BBM rendah sulfur sesuai standar Euro 4 secara penuh. Penerapan ini akan diperluas secara bertahap hingga tahun 2028 dengan target 100% distribusi secara nasional. Untuk solar, target pencapaian

distribusi adalah 32,9% pada tahun 2025, meningkat menjadi 70,6% pada tahun 2027, dan mencapai 100% pada tahun 2028. Adapun untuk bensin, target pencapaian distribusi adalah 62,1% pada tahun 2025, meningkat menjadi 78,8% pada tahun 2027, dan mencapai 100% pada tahun 2028. Penerapan BBM rendah sulfur sesuai standar Euro 4 menjadi bagian dari komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi karbon sesuai *Paris Agreement*.

Untuk mencapai target penerapan BBM rendah sulfur sesuai standar Euro 4 di seluruh Indonesia, diperlukan upaya kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak. Regulasi yang lebih rinci dan tegas perlu segera diterbitkan untuk memperkuat penerapan BBM rendah sulfur sesuai standar Euro 4. Di sisi lain, penegakan hukum harus ditingkatkan guna memastikan kepatuhan distribusi. Investasi pada infrastruktur pengolahan perlu menjadi prioritas dan Pertamina sebagai penyedia dapat meningkatkan kapasitas kilang melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha atau melalui penanaman modal negara (PMN).

Atensi DPR

Sektor transportasi menjadi salah satu kontributor utama polusi udara di Indonesia sehingga perlu adanya upaya pengelolaan emisi di sektor ini. Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah merancang peta jalan penerapan BBM rendah sulfur sesuai standar Euro 4 di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kualitas udara, dengan target distribusi nasional tercapai 100% pada tahun 2028. Terkait hal ini, Komisi XII DPR RI perlu melakukan pengawasan terhadap upaya penerapan BBM rendah sulfur sesuai standar Euro 4, khususnya dalam proses distribusi dan kualitas BBM yang disalurkan. Komisi XII DPR RI juga perlu mendorong Pertamina untuk meningkatkan kapasitas teknologi pengolahan dan memodernisasi fasilitas produksi BBM agar sesuai standar Euro 4. Terlepas dari upaya penerapan BBM rendah sulfur sesuai standar Euro 4 ini, Komisi XII DPR RI juga perlu meminta pemerintah untuk terus mendorong penggunaan kendaraan listrik yang lebih ramah lingkungan.

Sumber

antaranews.com, 20 November 2024;
hijau.bisnis.com, 20 November 2024;
katadata.co.id, 20 November 2024;
kompas.com, 20 November 2024; dan
nasional.kontan.co.id, 19 November 2024.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman
Rachmi Suprihartanti S.

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Suhartono
Venti Eka Satya
Dewi Wuryandani
Eka Budiyantri

Kesra

Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.
Devindra R. Oktaviano

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

